

Tata Kelola Pendidikan Berdasarkan UNESCO Road Map Sebagai Implementasi SDGs Poin 4 di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Hilastu Firdaus¹

Rusdiyanta²

Abstract

This research intend to analyze the quality of education in Indonesia based on the framework of Sustainable Development Goals (SDGs) point 4. The targets are nine indicator that have achieved by each country pass through the UNESCO Road Map. Especially Indonesia, need to adopt the road map into the national policies and conform to the condition of education in Indonesia. The focus of the study is in the border region of Indonesia, Entikong boundary, Sanggau Regency, West Kalimantan. The main problem of this study is how the governace of education by UNESCO Road map as implementing SDGs point 4 on the Entikong Boundary, Sanggau Regency, West Kalimantan. This research has a purpose to (1) to describe the educational governance at Entikong boundary, Sanggau Regency. (2) to describe the framework of SDGs point 4 pass through UNESCO Road Map. (3) to analyze the effort of governments in developing education governance at the Entikong boundary as educational quality improvement framework based on SDGs point 4. The approach taken in this study is qualitative primary and secondary data. The Datas were analyzed by using the concept of sustainable development and good governance. The result showed that in meeting the target of SDGs point 4, the government of Indonesia to implement and to adopt the UNESCO Road Map into the National Medium Term Development Plans (RPJMN) and the policies made by the regional government pass through the education of Sanggau Regency. In particularly the management of education in the Entikong boundary. The conclusion of this research is the targets of SDGs point 4 are not been achieved during the year. Furthermore UNESCO Road Map has not been able to prove that governance of education in border areas are not synergies between governemnt role, privat sector, and public sector.

Keywords: SDGs point 4, UNESCO Road Map, Quality Education, Entikong Boundary

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi luhur. Email: firdhaus.benjamin@gmail.com

² Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda PBB guna melaksanakan pembangunan disegala bidang. Terdapat 17 tujuan SDGs dan 169 sasaran yang harus dipenuhi oleh tiap negara (United Nations, 2015). Salah satu tujuan SDGs yaitu bidang pendidikan yang tertuang pada poin 4. UNESCO merupakan lembaga PBB yang diberi mandat untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan (*Education Sustainable Development-ESD*) melalui *UNESCO Road Map*. *UNESCO Road Map* mulai diberlakukan pada kegiatan *The World Education Forum* di Korea Selatan tahun 2015 dengan tema *The Incheon Declaration for Education 2030* (Sumber: UNESCO Documents).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani SDGs terikat secara moral dan sosial. Maka dari itu, Indonesia perlu melaksanakan pembangunan pendidikan. Namun begitu, pemerintah Indonesia juga perlu menerjemahkan *UNESCO Road Map* berdasarkan kondisi dan keadaan di Indonesia. Kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat pada *Human Development Index* (HDI) yang diterbitkan tahun 2015. Posisi Indonesia hanya berada di urutan 110 dari 188 negara (Sumber: United Nations). Bahkan Indonesia masih kalah bersaing dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Untuk itu, pemerintah Indonesia telah mengejawantahkan sasaran SDGs poin 4 ke dalam visi-misi Nawa Cita Presiden Jokowi yang diurai ke dalam RPJMN 2015-2019 (Murniningtyas, 2016). Terkait pembangunan kualitas manusia, pemerintah menuangkan dalam Nawa Cita poin 5 (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, 2014). Selain itu wilayah perbatasan yang notaben terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menjadi salah satu priotas pemerintah yang dikonvergensi ke dalam Nawa Cita poin 3, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan kualitas manusia di kawasan perbatasan masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari beberapa provinsi yang memiliki Index Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah dibanding dengan IPM nasional. Salah satunya adalah provinsi Kalimantan Barat (Badan Pusat Statistik, 2015a). Kalimantan Barat secara administrasi memiliki salah satu wilayah perbatasan yaitu di Kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Entikong yang berada di Kabupaten Sanggau memiliki lima desa, di mana tiga diantaranya termasuk dalam klasifikasi desa tertinggal (Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

Keterkaitan wilayah perbatasan Entikong dengan tema besar SDGs poin 4 yaitu pendidikan inklusif, berkeadilan, dan pendidikan seumur hidup belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Entikong. Pendidikan yang inklusif bermakna pendidikan yang bisa diterima oleh semua. Dengan kata lain pendidikan inklusif juga harus bisa dijangkau oleh masyarakat minoritas, terpinggirkan, dan tertinggal sehingga mereka perlu mendapatkan pendidikan layanan khusus (Latif, dkk, 2013: 316). Selanjutnya, persoalan kesenjangan menjadi salah satu isu yang sering dialamatkan kepada masyarakat Entikong. Kesenjangan ekonomi dan sosial sering mereka dapatkan dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Khususnya bidang pendidikan, anak-anak sekolah di kawasan perbatasan belum memperoleh kesetaraan diberbagai aspek pendidikan. Selain itu, masyarakat di Entikong juga belum sepenuhnya memiliki wadah terwujudnya pendidikan seumur hidup. Hal ini bisa dilihat dari lembaga pendidikan yang ada di sana. sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hanya berjumlah 13 lembaga (Kemendikbud, 2013). SD sebanyak 17 sekolah, SMP ada 5 sekolah dan SMK 2 sekolah (Badan Pusat Statistik, 2015b). Bahkan perguruan tinggi hingga lembaga pelatihan untuk orang dewasa belum tersedia di Entikong.

UNESCO Road Map memuat mekanisme pendidikan berkelanjutan. Seluruh pemangku kepentingan dilibatkan untuk menjalankan ESD. Di mana peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta saling menguatkan agar bisa mengakselerasi mekanisme *UNESCO Road Map* di tingkat lokal. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas permasalahan pendidikan di perbatasan Entikong. Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncul pertanyaan penelitian yaitu "*Bagaimana tata kelola pendidikan berdasarkan UNESCO Road Map sebagai implementasi SDGs poin 4 di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat?*"

Pembahasan

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan, dalam rangka menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat dan pembangunan itu harus menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat (A'ling, 2015: 545-559). Pembangunan dibedakan menjadi dua kelompok, bersifat fisik dan non fisik. Pembangunan bersifat fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud berupa jembatan, jalan, gedung, pasar, gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, puskesmas, dan saluran air. Sedangkan pembangunan non fisik adalah sebuah pembangunan yang tidak berwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contoh pembangunan ini adalah pembangunan bidang keagamaan, bidang kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan dibidang keamanan dan ketertiban (A'ling, 2015: 545-559).

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNI (*Gross National Income*), baik secara keseluruhan maupun per kapita yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain (Todaro & Smith (Ed.), 2016: 20). Namun setelah tahun 1970-an konsep pembangunan mengalami redefinisi seiring dengan munculnya fenomena pembangunan yang tidak lagi bisa dikaitkan dengan perspektif ekonomi saja. Lebih lanjut, permasalahan seperti kemiskinan, tingkat pengangguran, serta ketimpangan pendapatan menjadi tiga isu mendasar untuk mengukur pembangunan di suatu negara. Sehingga, *World Bank* dalam salah satu publikasi resminya, yakni *World Development Report* (1991), melontarkan pernyataan tegas bahwa (Todaro & Smith (Ed.), 2016: 22):

"Tantangan utama pembangunan... adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di negara-negara paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi—namun, yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya."

Seiring dengan perkembangan paradigma pembangunan dalam masyarakat maka pembangunan ini mulai mengarah pada konsep yang berorientasi pada lingkungan. Di mana dalam prosesnya pembangunan ini tetap melihat aspek-aspek lingkungan agar dapat digunakan pada masa generasi berikutnya atau tetap berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan dipopulerkan pada sebuah laporan yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: "*Development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*" (Drexhage & Murphy, 2016: 6).

Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan secara kompleks dan menyeluruh, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar setiap manusia. Di samping itu, dalam memenuhi setiap hak dasarnya, manusia dituntut untuk menyelaraskan kebutuhan yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga, generasi berikutnya dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Pemahaman inilah yang diartikan sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan apabila tidak ada masalah ketidakmerataan antargenerasi (*intergenerational inequality problem*) (Suparmoko & Ratnaningsih, 2011: 18).

Konsep Good Governance

World Bank mendefinisikan kata *governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development society.*" Sementara, UNDP mengemukakan definisi *governance* sebagai "*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*" (Rosidin, 2010: 178). Lebih lanjut, UNDP mengemukakan, bahwa *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain, yaitu, negara atau pemerintahan (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*society*) (Rosidin, 2010: 179). Ketiga domain ini tidak hanya sekedar dijalankan, namun harus masuk kategori yang baik (*good*). Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2012: 6).

UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Maka UNDP kemudian mengajukan karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, yaitu sebagai berikut: *Participation; Rule of law; Transparency; Responsiveness; Consensus orientation; Effectiveness and efficiency; Accountability; Strategic vision* (Sedarmayanti, 2012: 7-8).

Implementasi SDGs Poin 4 melalui UNESCO Road Map

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan berkelanjutan diperlukan sinergitas antara pihak-pihak relevan agar pelaksanaan pembangunan pendidikan mengalami kemajuan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Para *stakeholder* juga perlu menempatkan prioritas kerja dalam upaya memajukan pendidikan di negaranya. Aspek-aspek tersebut hanya akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan bersama-sama menciptakan rencana aksi pembangunan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sehingga dalam tata pelaksanaan program-program pendidikan tidak salah jalur. Dalam kerangka kerja ESD, UNESCO menempatkan lima area

prioritas untuk dijalankan para pemangku kepentingan. Negara-negara anggota inilah yang harus menerjemahkan kerangka kerja ESD ke dalam program kerja pemerintah tiap negara. Kelima aksi prioritas tersebut, yaitu, **pertama**, peningkatan kebijakan. Dengan mengintegrasikan pembangunan pendidikan berkelanjutan pada kebijakan internasional dengan kebijakan nasional tiap negara. **Kedua**, mengubah lingkungan belajar dan pelatihan. Membangun rencana yang berupaya mendedikasikan suasana belajar dan latihan sesuai ESD. **Ketiga**, membangun kapasitas tenaga pendidik dan pelatih. Menyelaraskan ESD ke dalam pendidikan guru, mengajarkan tentang *sustainability*. **Keempat**, memberdayakan dan memobilisasi anak muda. Menyiapkan pemuda melalui penguasaan IPTEK sehingga bisa memobilisasi ESD ke dalam aksi-aksi kepemudaan berbasis internet. **Kelima**, mempercepat solusi pembangunan di tingkat lokal. Menguatkan jaringan multi *stakeholder* di tingkat lokal (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014: 16-25).²³

Kualitas Pendidikan di Perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, Indonesia

Kecamatan Entikong yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan tepencil memiliki berbagai persoalan terkait isu perbatasan. Khusus dibidang pendidikan, kualitas pendidikan di Kecamatan ini sangatlah memprihatinkan. Karena di wilayah ini terdapat beberapa desa yang sangat jauh dari pusat kota (kecamatan) sehingga sulit mendapatkan fasilitas yang memadai. Terkait isu pendidikan di wilayah perbatasan Entikong, terdapat beberapa persoalan terkait buruknya kualitas pendidikan di perbatasan sehingga sangat sulit untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan. Persoalan-persoalan tersebut, yaitu:

- a) Rendahnya kualitas dan kompetensi guru
Untuk menentukan keberhasilan siswa dalam belajar, tidak lepas dari peran serta guru di dalamnya. Diperlukan tenaga pengajar yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya sehingga usaha untuk mencapai pendidikan bermutu bisa terlaksana. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Indonesia, 2005). Lebih lanjut, dalam pasal 9 menyebutkan pula bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Indonesia, 2005). Pada kasus di Entikong, guru SD sebanyak 134 guru, SMP (52 guru), dan SMK (42 guru). Walaupun guru yang memiliki gelar pendidikan S1 lebih besar untuk semua jenjang pendidikan (SD-87 guru; SMP- 48 guru; SMK-38 guru) (Data Pokok Pendidikan, 2016), namun jumlah guru yang sudah bersertifikasi pada tiap jenjangnya masih rendah. Sebanyak 61 persen dari total guru SD di Entikong belum bersertifikasi. Diikuti SMP (73 persen), dan SMK (86 persen). Permasalahan tenaga pendidik yang belum bersertifikasi di Kecamatan Entikong mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah ini. Persoalan ini sangatlah serius terutama bagi kelangsungan pendidikan bermutu di wilayah perbatasan Entikong.

- b) Terbatasnya tenaga pengajar dan kesejahteraan guru yang terabaikan Berdasarkan hitungan yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, jumlah siswa SD di Kecamatan Entikong ada 2302 siswa dengan jumlah sekolah SD 17 sekolah dan guru 123 orang (Data Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, 2016). Sehingga rata-rata sekolah yang ada di Kecamatan Entikong hanya memiliki 7 guru tiap sekolah. Apabila ditiap kelas antara kelas 1 sampai kelas 6 hanya memiliki 1 guru, sudah dipastikan guru itu akan mengajar murid-murid lebih dari satu mata pelajaran. Bahkan guru tersebut juga harus mengajar pelajaran khusus seperti pendidikan olahraga, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya.

Kesejahteraan tenaga pengajar juga seolah terabaikan. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan guru yang mau mengabdikan diri di wilayah perbatasan. Terutama rendahnya pendapatan yang mereka terima. Menurut Bapak Willy, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, upah tenaga pengajar masih berada di bawah upah regional. Upah yang mereka terima sebesar 1.4 juta seharusnya mereka mendapatkan 1.8 juta (Welly, 2016).

- c) Fasilitas dan sarana prasarana yang kurang memadai Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu diperlukan sarana dan prasarana penunjang bagi kelangsungan pembelajaran di sekolah. Hal ini yang tidak terdapat di sekolah-sekolah pedalaman Entikong. Pada contoh kasus yang peneliti temukan di lapangan, terdapat kelas-kelas yang sangat kotor, gelap, dan tidak nyaman dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Lantainya hanya beralaskan semen sehingga mudah berdebu. Ketersediaan listrik hanya ada pada malam hari dengan bantuan PLTA. Hal ini sangatlah menyulitkan para siswa apabila sedang berada di dalam kelas. Mereka memanfaatkan cahaya matahari saat sedang melakukan kegiatan belajar mengajar.

Permasalahan krusial lainnya adalah mengenai infrastruktur penunjang di wilayah perbatasan. Akses jalan di Kecamatan Entikong sangatlah buruk, terutama jalur menuju pedalaman. Jalan beraspal hanya ada di wilayah perkotaan saja, selebihnya jalanan hanya tanah, batuan, dan pasir. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya kendaraan bermotor yang bisa dilalui. Hanya ada sepeda motor yang bisa dilalui di jalanan yang sangat terjal dan menyulitkan serta jalur air menggunakan sampan. Sehingga kendaraan roda empat tidak bisa melintasi jalan menuju pedalaman. Dengan kondisi seperti itu, mengakibatkan mobil angkutan umum tidak tersedia. Padahal untuk menjangkau dari satu desa ke desa lain diperlukan kendaraan yang bisa mengakomodir masyarakat di lokasi tersebut.

- d) Kurangnya kesempatan belajar
Sistem Pendidikan Nasional seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi semua untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Karena pendidikan itu menjadi hak setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali masyarakat yang berada di kawasan 3T. Tapi kenyataannya, Kecamatan Entikong saat ini tidak memiliki Sekolah Menengah (SMA) dan Perguruan Tinggi. Selain itu, program SDGs menginginkan adanya pendidikan inklusif bagi penyandang cacat atau disabilitas. Namun, Kecamatan Entikong belum menyediakan sekolah bagi penyandang cacat atau disabilitas. Di samping itu jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jumlahnya pada tahun 2013 yang ada di Kecamatan Entikong masih sangat sedikit. Secara keseluruhan jumlah PAUD yang ada di Kecamatan Entikong sebanyak 12 lembaga dari berbagai jalur pendidikan baik formal, non formal, dan informal. Kebanyakan PAUD yang ada di Kecamatan Entikong adalah kategori Kelompok Bermain (KB).
- e) Lemahnya sinergitas pemerintah dalam mengelola pendidikan di wilayah tertinggal
Salah satu faktor penting peran pemerintah adalah dengan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu, pemerintah pusat dalam membuat kebijakan perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan setiap daerah sehingga untuk menangani berbagai persoalan di daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan *in depth interview* yang peneliti lakukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, peneliti menemukan ketidakcocokan terkait beberapa kebijakan. Hal yang paling dominan mengapa tidak berjalannya sinergi antara pusat-daerah adalah soal anggaran. Pemda menyatakan bahwa setiap kebijakan yang mereka buat dan membutuhkan anggaran besar selalu dipangkas oleh pusat. Sehingga implikasinya adalah Dinas Pendidikan tidak bisa memaksimalkan potensi dan menjalankan strategi pendidikan dengan baik, efektif, dan efisien (Welly, 2016).
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan pun nampaknya tidak berjalan optimal. Sinkronisasi antara semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, serta nasional) tidak berjalan efektif karena adanya ego sektoral antar instansi. Seperti contohnya persoalan ketersediaan listrik. Pihak Dinas Pendidikan tidak mau disalahkan atas ketidakterseidannya pasokan listrik di wilayah perbatasan sehingga mengganggu kegiatan belajar. Begitupun ketersediaan internet, pada beberapa sekolah di Dusun Suruh Tembawang, salah satunya adalah SDN 05 yang menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut mensyaratkan setiap siswa harus aktif dengan mencari tahu mengenai berbagai materi pelajaran melalui berbagai sumber salah satunya melalui internet. Ketika pemerintah menerapkan kurikulum tersebut sementara di perbatasan tidak bisa terjangkau sinyal internet maka pihak sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi seadanya. Dinas Pendidikan pun tidak mau disalahkan begitu saja karena hal tersebut menjadi tanggung jawab instansi lain.

Tata Kelola Pendidikan berdasarkan UNESCO Road Map di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Indonesia

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan berkelanjutan (ESD) diperlukan sinergitas para pemangku kepentingan yang efektif, efisien, dan terencana. Melalui rencana aksi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, Bappenas, Bappeda, pemimpin di semua jenjang pendidikan, tenaga pengajar, para siswa, peneliti, pemerhati pendidikan, dunia usaha, industri, hingga masyarakat umum perlu mewujudkan ESD secara terintegrasi dan relevan. Sehingga konsep pendidikan berkeadilan, inklusif, dan seumur hidup seperti yang diamanatkan program SDGs poin 4 bisa terwujud serta sejalan dengan konsep *good governance* yang mensyaratkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam tata kelola pendidikan sesuai dengan *UNESCO Road Map*.

a) Peningkatan Kebijakan

Berdasarkan kerangka kerja yang tertuang dalam aksi prioritas ESD diperlukan integrasi yang diadopsi dari UNESCO kepada kebijakan nasional. Jika kita melihat RPJMN 2015-2019 serta RPJMD Kabupaten Sanggau serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau tahun 2016, pemerintah terus mengupayakan bagaimana meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan sehingga bisa terus bersaing dengan negara lain. Hal ini sejalan dengan karakteristik dari *good governance* bahwa kerangka hukum yang diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan tanpa perbedaan. Di samping itu, dalam dunia modern saat ini, pemerintah perlu mengakselerasi keterlibatan sektor publik sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah atau alat kebijakan guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat (Mok, 2006). Sehingga dalam keterkaitan dengan karakteristik *good governance*, poin pada responsif, konsensus, dan partisipatif bisa dijalankan dalam kasus di Entikong.

b) Mengubah Suasana Pembelajaran dan Pelatihan

Untuk menghadirkan suasana pembelajaran yang efektif, setidaknya diperlukan dua hal utama. Pertama, pengetahuan dan keahlian profesional, kedua komitmen dan motivasi. Guru yang efektif menguasai materi pelajaran serta keahlian mengajar yang baik. Selain itu efektifitas dalam kelas akan terjadi apabila memiliki strategi pengajaran yang baik dan didukung oleh penetapan tujuan, rancangan pengajaran, dan manajemen kelas. Selanjutnya, untuk menghadirkan pembelajaran yang efektif diperlukan komitmen dan motivasi. Aspek ini mencakup sikap yang baik dan perhatian kepada murid (Santrock, 2007).

Dalam tataran daerah, pelaksanaan pembelajaran yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan masih belum efektif. Terlihat dari penggunaan kurikulum baru yang dijalankan oleh Indonesia melalui Kurikulum 2013 (K13) masih mengalami kendala di segala lini. Mulai dari isi, tenaga pengajar, hingga pelaksanaannya. Terlebih K13 ini memang tidak cocok diterapkan pada daerah-daerah tertinggal. Penerapan kurikulum akan berimplikasi pada metode belajar yang digunakan. Suasana belajar dan latihan yang diintegrasikan kepada konsep ESD perlu juga dipraktekan. Hal ini pula yang menghambat penerapan ESD di wilayah Entikong khususnya pedalaman Entikong. Untuk memperoleh suasana belajar yang nyaman saja menjadi persoalan yang sangat berat bagi sekolah-sekolah di Entikong. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ruang kelas yang gelap,

panas, kotor, berdebu, dan tanpa penerangan, menjadi penghambat terbesar dalam menjalankan ESD. Sehingga banyak murid yang belum memahami pendidikan berkelanjutan dengan baik. Apalagi mereka masih menggunakan cara konvensional dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru.

- c) **Membangun Kapasitas Tenaga Pendidik dan Pelatih**
Melalui UU Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 butir (2) menyebutkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (Indonesia, 2005). Lebih lanjut, dalam pasal 20 butir dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berdasarkan hasil lapangan yang peneliti dapatkan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau hampir semua tenaga pengajar di Kabupaten Sanggau sudah memenuhi kualifikasi lulusan sarjana S-1/D-IV, terutama untuk tingkat SMP dan SMK. Khusus untuk guru-guru SD, sudah di atas 50 persen tenaga pengajarnya berlatar pendidikan PGSD (Welly, 2016).
- d) **Memberdayakan dan Memobilisasi Kaum Muda**
Generasi muda merupakan pewaris dan penerus cita-cita bangsa serta sebagai sumber pembangunan nasional. Terlebih, sebagian besar populasi di Indonesia diisi oleh pemuda. Untuk itu diperlukan upaya pemberdayaan pemuda agar bisa menjadi inspirator, inisiator, serta motivator bukan sebagai *follower*. Pada kasus di Entikong, keberadaan pemuda belum bisa menunjukkan peran yang sangat berarti untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Sehingga keberadaan pemuda masih perlu diperkuat lagi melalui kegiatan kepemudaan agar program SDGs yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah itu bisa berjalan dengan baik.
- e) **Mempercepat Solusi Berkelanjutan di Tingkat Lokal**
Untuk dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan dibutuhkan peran para *stakeholder* secara komprehensif. Para *stakeholder* perlu menguatkan jaringan mulai dari tingkat lokal, nasional, serta global dengan mengintegrasikan program-program ESD. Selain itu, pemangku kepentingan yang berada di tingkat lokal harus diperluas dan ditingkatkan lagi kapasitasnya sehingga mereka bisa bekerja secara optimal membangun dan menjalankan ESD.

Hingga saat ini rancangan perpres SDG belum mencapai final. Implikasinya adalah belum adanya peta jalan dan rencana aksi yang relevan terkait SDGs yang harus dijalankan ditingkat lokal. Khusus Kabupaten Sanggau, pada bidang pendidikan pun saat ini Pemda hanya mengacu pada RPJMD 2015-2019. Pemda Kabupaten Sanggau melalui Dinas Pendidikan terus mengupayakan kemajuan atau peningkatan. Seperti tersedianya akses pendidikan semua jenjang pendidikan termasuk untuk anak-anak penyandang cacat, SMA, dan perguruan tinggi. Selain itu, Pemda perlu melakukan koordinasi pada instansi-instansi yang relevan terhadap wilayah perbatasan terkait penunjang infrastruktur, ketersediaan air bersih, listrik, rumah sakit, internet, dan sebagainya. Agar proses pendidikan yang ada di Kabupaten terutama di Kecamatan Entikong bisa berjalan dan sesuai dengan ESD.

Kesimpulan

Pendidikan berkualitas dalam perspektif SDGs yaitu pendidikan inklusif, kesetaraan, dan pendidikan seumur hidup bagi semua. Inklusif memiliki arti sebagai pendidikan yang berupaya menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi seseorang memperoleh pendidikan. Hambatan-hambatan tersebut bisa terkait masalah fisik, gender, kemiskinan, sosial, etnis, dan lainnya. Sementara untuk kesetaraan, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran tanpa adanya kesenjangan baik gender, status sosial, maupun daerah. Sehingga seluruh masyarakat yang ada di dalam setiap negara bisa memperoleh pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan pendidikan seumur hidup diartikan sebagai proses di mana seseorang berhak memperoleh pendidikan sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Proses tersebut bisa berlangsung di mana saja, seperti dalam lingkungan masyarakat, lembaga non formal, maupun sekolah.

Dengan definisi yang tertuang dalam SDGs poin 4, kawasan perbatasan menjadi salah satu kawasan yang sesuai dengan indikator-indikator tersebut. Inklusif, karena kawasan perbatasan merupakan kawasan yang notabene terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang didiami oleh masyarakat miskin. Sehingga mereka perlu mendapatkan pelayanan khusus dalam pendidikan. Selain itu, kawasan perbatasan juga cenderung tidak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Mulai dari ketersediaan tenaga pengajar bermutu, sarana prasarana dan fasilitas yang minim, infrastruktur yang sangat buruk, bangunan sekolah yang tidak representatif, hingga tata kelola pendidikan yang buruk menjadi sejumlah persoalan di dunia pendidikan khususnya kawasan perbatasan.

Entikong sebagai salah satu kawasan perbatasan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Khususnya dalam upaya membangun kualitas manusia di daerah tersebut melalui pendidikan. Melalui mekanisme *UNESCO Road Map*, pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan sasaran-sasaran SDGs ke dalam kebijakan nasional dan rencana strategis melalui RPJMN 2015-2019. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau melalui RKP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) 2016 mengupayakan pembangunan melalui berbagai strategi terutama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat dan mengurangi angka buta huruf di Kabupaten Sanggau, khususnya di Entikong.

Dapat dikatakan, secara kuantitas memang Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau telah memenuhi target yang tertuang dalam sasaran-sasaran SDGs dan RPJMD. Namun begitu pendidikan di Kabupaten Sanggau khususnya kawasan perbatasan secara kualitas masih jauh dari sempurna. Masih banyak ketimpangan di sana-sini, selain itu masih banyak warga di kawasan perbatasan yang tidak memperoleh hak pendidikan secara komprehensif seperti tersedianya tenaga pengajar yang bermutu, ketersediaan sanitasi, air bersih, listrik, dan internet juga tidak sepenuhnya mereka terima. Kemudian kesejahteraan tenaga pengajar yang tidak terjamin sehingga mereka enggan untuk mengajar di kawasan perbatasan, serta sejumlah persoalan lainnya yang menunjukkan kualitas pendidikan di kawasan perbatasan sangat rendah. Program SDGs yang sudah berjalan selama satu tahun nampak belum bisa dijalankan di kawasan perbatasan ini, khususnya bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau selaku aktor utama dalam tata kelola pendidikan di perbatasan. Keterbatasan dana dan ego sektoral antar instansi menjadi serangkaian permasalahan pendidikan di perbatasan.

Referensi

- Aylin A'ling. (2015). "Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau." *Pemerintahan Integratif* 3 (4): 545-559.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Profil Potensi Kawasan Perbatasan Kecamatan Entikong, <http://tasbara-bnpp.com/index.php/publikasi/buku/item/340-profil-potensi-kecamatan-lokpri-entikong-sanggau-kalbar> diunduh 26 September 2016.
- Badan Pusat Statistik. (2015a). *Index Pembangunan Manusia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015b). "Statistik Daerah Kecamatan Entikong." Sanggau: BPS.
- Data Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau. (2016). Kabupaten Sanggau.
- Data Pokok Pendidikan. (2016). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Drexhage, John & Deborah Murphy. (2010). *Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012*. New York: International Institute for Sustainable Development (IISD).
- Murniningtyas, Endah. (2016). "Kesiapan Indonesia Wujudkan SDGs." *Kompas*, 19 September.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005*.
- Kemendikbud, (2013), <http://dapo.paud-dikmas.kemendikbud.go.id/index.php/kecamatan/6105220>, diakses 22 Desember 2016.
- Latif, Mukhtar. *et. al.* (2013). *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mok, Ka Ho. (2006). *Education Reform and Education Policy in East Asia*. New York: Routledge.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. (2014). RPJMN-Buku III: Agenda Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bappenas.
- Rosidin, Utang. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Santrock, John W. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance-Kepemerintahan yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Suparmoko, M. & Maria Ratnaningsih. (2011). *Ekonomika Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Todoaro, Michael P. & Stephen C. Smith (Ed.). (2006). *Pembangunan Ekonomi*. United Kingdom: Pearson Education Limited.

Tata Kelola Pendidikan Berdasarkan UNESCO Road Map Sebagai Implementasi SDGs Poin 4 di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

- United Nations, (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> diunduh pada 29 Agustus 2016.
- UNESCO Documents, <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf> diunduh 5 Oktober 2016.
- United Nations, <http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/trends/dem-comp-change.shtml> diunduh 18 Juli 2016.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2014). *Roadmap for Implementating the Global Action Programme on Education for Sustainable Development*. France: UNESCO.
- Welly, Willibrordus. (2016). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat: Disdikpora. Wawancara, 8 November.